

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas menunjukkan bahwa peristiwa sejarah banyak dipengaruhi oleh persoalan kepemimpinan. Keberhasilan sebuah institusi, organisasi, perusahaan ataupun kelompok akan ditentukan oleh efektivitas kepemimpinannya, sehingga kepemimpinan atau *leadership* dapat dikatakan inti dari kemajuan institusi, organisasi, perusahaan ataupun kelompok tersebut.

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian diatas, terang bahwa pemimpin yang berhasil mestilah seorang yang mampu membangun pola hubungan yang baik dengan *followernya*, mampu menggunakan wewenang dan pengaruhnya dalam proporsi dan situasi yang tepat untuk membawa *followernya* bersama-sama bergerak dalam irama langkah teratur menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Miftah, 1995, h.6).

Kepemimpinan perempuan telah menjadi sebuah isu hangat dari dahulu hingga saat ini, zaman globalisasi, masyarakat masih memandang keterlibatan perempuan dalam sebagai pemimpin dalam

sebuah organisasi sebagai bentuk pengingkaran kodrat ataupun suatu pemberontakan perempuan terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam segala bentuk (Nashori, 2009, h.153).

Dikemukakan oleh Naisbit (1998, h.66) bahwa terdapat delapan perubahan besar yang sedang terjadi di Asia, salah satunya adalah perubahan dominasi laki-laki yang diimbangi oleh munculnya kaum perempuan. Perubahan yang paling nyata adalah munculnya banyak pengusaha dan politikus perempuan di Asia yang sangat populer di dunia internasional.

Dalam konteks Asia lahirnya tokoh politik seperti Gloria Macapagal Arroyo dan Corazon Aquino dari Filipina, Aung San Su Kyi dari Myanmar, Begun Khaledah Zia dari Bangladesh, Khuying Saputra Masdit dari Thailand dan Megawati Soekarnoputri dari Indonesia setidaknya membenarkan pernyataan diatas bahwa dominasi laki-laki dalam kancah politik mulai diseimbangkan oleh munculnya pemimpin-pemimpin perempuan tersebut.

Jika melihat sejarah bangsa Indonesia di zaman tradisional, yaitu masa dimana Indonesia belum menjadi negara kesatuan dan masih terpecah-pecah dalam kerajaan, khususnya di Jawa. Maka dapat dikatakan bahwa beberapa perempuan Jawa pernah menjadi pemimpin formal kerajaan atau setidaknya menjadi tokoh sentral sebuah pergerakan (Soekmono, 26 Desember 2009) dan sebenarnya

isu-isu kesetaraan gender dan kepemimpinan wanita yang marak di tahun 1998 dan 1999 bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.

Di penghujung tahun 1998 yang lalu, di Indonesia wacana pemimpin perempuan telah mencuat ke permukaan. Salah satu kasus pada saat itu adalah ketika Megawati Soekarnoputri tampil sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia dalam konstitusi negara tidak terdapat diskriminasi dan pembatasan hak warga negara terhadap peran sosial politiknya dan tidak ada penyebutan jenis kelamin didalamnya. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "Presiden adalah orang asli Indonesia". Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara yang pro maupun kontra terhadap pemimpin perempuan. Menjadi pembahasan dan perbincangan publik yang sangat menarik, menjadi polemik dan perdebatan yang seru antara kelompok-kelompok yang pro dengan yang kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Tidak hanya pada tataran praktisi namun juga pada tataran akademisi. Apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat *patrilinial*, yakni memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, mengamanatkan bahwa keterwakilan kuota 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif dapat dikatakan sudah dapat

diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009 (Syair, 14 September 2009).

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga pasal penting yang menjadi payung hukum keterwakilan perempuan dalam perhelatan Pemilu 2009. Pertama, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) pasal ini mengatur ketentuan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kedua, Pasal 53 yang mengatur tentang ketentuan bakal daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Adapun yang dimaksud Pasal 52 adalah mengatur tata cara pencalonan anggota legislatif dari jalur partai politik. Ketiga, Pasal 55 ayat (2) yang mengatur ketentuan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (Syair, 14 September 2009).

Konsekwensi dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, diharapkan perempuan dapat berkiprah ke dunia politik semaksimal mungkin. Selain dari itu, dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan, juga dijelaskan dalam Undang-undang No.39/1999 dan Undang-Undang No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan (Syair, 14 September 2009).

Secara ekspilisit Pasal 46 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Syair, 14 September 2009).

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus guna mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan (Syair, 14 September 2009).

Dalam kancah politik Indonesia bukan hanya perempuan-perempuan yang berhasil terpilih sebagai wakil rakyat di DPR maupun DPRD dan Megawati Soekarnoputri yang muncul sebagai pemimpin perempuan, juga ada beberapa nama yang berhasil menjadi pemimpin perempuan di beberapa daerah di Indonesia. Rustriningsi mantan Bupati Kebumen periode 2000-2005 dan 2005-2010 namun tidak terselesaikan karena terpilih menjadi wakil Gubernur Jawa Tengah, di daerah lain juga adalah Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten periode 2007-2012 dan juga merupakan Gubernur perempuan pertama di Indonesia (www.wikipedia.org bahasa Indonesia, 10 Januari 2010).

Menurut data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dicatat dari 46 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diketahui, sekitar 60 persen pengelolanya adalah kaum perempuan. Dengan jumlah yang cukup banyak itu, peran perempuan pengusaha menjadi cukup besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan (www.Kompas.com, 27 Desember 2009).

Dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan besar untuk mengerti diri sendiri dan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Realitanya, kini tak dapat lagi dihitung dengan jari, banyak sudah perempuan yang menjadi pemimpin, menduduki posisi strategis sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa, yaitu sebagai 'presiden', sebagai bupati atau walikota, sebagai pimpinan lembaga penegak hukum, sebagai anggota legislatif, sebagai pemimpin perusahaan, ada pula yang berhasil meraih gelar doctor, dokter, sebagai kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, dan masih banyak lagi kedudukan yang kini dikuasai kaum perempuan (Romawati, 04 Mei 2009).

Beberapa contoh keberhasilan dan efektivitas kepemimpinan perempuan adalah dalam kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, seorang pemimpin perempuan yang memiliki kharisma sekuat ayahnya, Soekarno, Presiden pertama RI. Meskipun masa

kepemimpinan pemerintahan Megawati hanya berlangsung tiga tahun, akan tetapi usaha dan kerja kerasnya adalah prestasi yang mengagumkan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi mencapai 9 % dan angka pengangguran turun menjadi lima juta dari 13 juta. Juga sebagai ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimana dalam kepemimpinannya, PDI-P menjadi partai yang besar, melahirkan banyak pemimpin baru yang loyal dan berdedikasi, mempertahankan PDI-P sebagai partai koalisi pemerintah (Manroe, 3 Januari 2008).

Juga dalam dunia usaha dapat dilihat bahwa Martha Tilaar, berkat kerja kerasnya selama 33 tahun, kini menakhodai kapal besar perusahaan kosmetika Indonesia berlabel "Sari Ayu Martha Tilaar" dengan omzet Rp 600 milyar setahun. Pengalaman dan semangat berjualan gelang jali-jali di masa kanak-kanak, memacunya menjadi istana bisnis kosmetik dan alat kecantikan nomor satu di negeri ini (Suplemen, GATRA, Nomor 23, 21 April 2003).

Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan perempuan di SMP Negeri 7 Semarang yang terletak di Jl Imam Bonjol 191 A Semarang juga merupakan salah satu contoh nyata dari keefektifitasan kepemimpinan perempuan. Posisi kepala sekolah dalam lima tahun terakhir dipegang perempuan, yakni Hj Tri Sulasmiyati MPd. Dia pun menggantikan pendahulunya yang juga perempuan, yakni Dra Hj Roch Mulyati MSi (kini kepala SMP 3 Semarang). Dari 36 orang guru yang ada, 21 diantaranya perempuan. Dibawah kepemimpinan kepala

sekolah perempuan, sekolah ini mengalami kemajuan yang begitu pesat dengan ditandai berbagai prestasi yang diraih oleh para pelajar mulai dari tingkat kota Semarang sampai tingkat nasional (Nugroho, 4 Juni 2009).

Hampir semua aspek kerja dipengaruhi oleh dan tergantung pada kepemimpinan. Artinya, kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi.

Keberhasilan manajemen suatu organisasi ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan. Karena kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki serta melaksanakan kepemimpinannya dengan baik agar memperoleh sukses dalam melaksanakan tugasnya.

Kepemimpinan yang efektif sangat dibutuhkan agar proses pengembangan para personalia pendidikan berjalan dengan baik. Kepemimpinan efektif adalah suatu kepemimpinan yang menghargai usaha para bawahan, yang memperlakukan mereka sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat masing-masing individu, yang memberi dorongan untuk berkembang dan mengarahkan diri ke arah tercapainya tujuan lembaga pendidikan.

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tinggi dalam kedua dimensi kepemimpinan (Winardi, 1990. h.62). Dua dimensi kepemimpinan tersebut adalah:

Pertama, Kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas. Yaitu hanya menekankan penyelesaian tugas-tugas kepada para bawahannya dengan tidak memperdulikan perkembangan bakat, kompetensi, motivasi, minat, komunikasi, dan kesejahteraan bawahan. Para personalia akan bekerja secara rutin, rajin, taat dan tunduk dalam penampilannya. Pemimpin seperti ini tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan lingkungan sehingga organisasi menjadi usang dan ketinggalan jaman.

Kedua, Kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan manusia. Yaitu menekankan perkembangan para personalianya, kepuasan mereka, motivasi, kerja sama, pergaulan dan kesejahteraan mereka. Pemimpin seperti ini berasumsi bila para personalia diperlakukan dengan baik, maka tujuan organisasi akan tercapai. Tetapi pada kenyataannya manusia tidak selalu beritikad baik, walaupun ia diperlakukan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran suatu organisasi.

Oleh sebab itu kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi antar hubungan manusia. Dengan mengintegrasikan dan meningkatkan keduanya kepemimpinan akan menjadi efektif, yaitu mampu mencapai tujuan organisasi tepat pada waktunya. Sebab kepemimpinan yang efektif dapat melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen dengan baik termasuk melaksanakan perencanaan dengan baik pula.

Efektivitas suatu kepemimpinan adalah merupakan perpaduan dari faktor internal maupun faktor eksternal dalam diri seorang pemimpin atau *Leader* dalam sebuah institusi, organisasi atau perusahaan.

Menurut Jerry dan Akbaria (Sispariyadi, 2009, h.353) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berhasilnya kepemimpinan perempuan diantaranya; gaya kepemimpinan, edukasi, pengaruh keluarga dan ekspektasi, jumlah saudara kandung, lama pengalaman kerja, status pernikahan, Motif dan tujuan, karakter personal, intensitas pendelegasian tugas, usia, jaringan, dan hubungan dengan orang lain serta hubungan dengan bawahan.

Bagi suatu organisasi, peran seorang pemimpin sangat penting artinya. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin adalah otak organisasi, pemimpin organisasi selalu membuat keputusan, membuat rencana dasar dan menentukan tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpin dan gaya kepemimpinannya dalam organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan oleh seseorang yaitu pemimpin dalam menjalin suatu hubungan dan mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama secara sukarela dalam suatu mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pemimpin.

Para pemimpin berusaha keras menemukan dan menerapkan berbagai model atau gaya kepemimpinan yang cocok saat memimpin dalam mencapai tujuan-tujuan. Hal ini dikarenakan para pemimpin menyadari bahwa model atau gaya kepemimpinan demokratis merupakan salah satu variabel atau faktor penentu keberhasilan dan efektivitas kepemimpinannya (Tjiharjadi, 2007, h18).

Dukungan sosial menurut Smith (1992, h.463) merupakan pertolongan dan semangat yang diberikan oleh orang lain dalam kehidupan seseorang dan dukungan sosial itu sendiri juga sebagai suatu variabel moderator yang mendukung keberhasilan seseorang. Melalui dukungan sosial, kesejahteraan psikologis akan meningkat karena adanya perhatian dan pengertian akan menimbulkan perasaan memiliki, meningkatkan harga diri, dan kejelasan identitas diri serta memiliki perasaan positif mengenai diri sendiri sehingga dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan efektif (Effendi, 1992, h.218).

Dalam konteks pendidikan, fenomena kepemimpinan perempuan memang telah menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih jauh. Dikatakan oleh Sudrajat (25 Mei 2008) Studi yang dilakukan Coleman menunjukkan kepala-kepala sekolah dan para manajer senior perempuan lainnya di Inggris dan Wales mengindikasikan mereka cenderung berperilaku model kepemimpinan transformatif dan partisipatif. Studi lainnya tentang kepala-kepala guru dan dan kepala-

kepala sekolah perempuan di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa para manajer perempuan tampil bekerja secara kooperatif dan memberdayakan koleganya serta memfungsikan *team work* secara efektif. Hasil lain dari studi yang dilakukan Jirasinghe dan Lyons, mendeskripsikan tentang kepribadian pemimpin perempuan sebagai sosok yang lebih supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati. Selain itu, mereka cenderung menjadi sosok pekerja tim, lengkap dan sempurna. Mereka juga mengidentifikasi diri dan mempersepsi dirinya sebagai sosok yang lebih rasional, relaks, keras hati, aktif dan kompetitif.

Kepemimpinan dalam dunia pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), lebih didominasi oleh kaum perempuan sejak diresmikan sebagai program nasional pada tahun 2000. Hal ini dikarenakan perempuan dipandang bisa memberikan pengasuhan yang baik, dapat mengayomi dan mendidik layaknya seorang ibu bagi anak-anak usia dini. Sama halnya dengan institusi lainya, kepemimpinan di PAUD merupakan urat nadi dari keberlangsungan institusi tersebut. Keberhasilan lembaga PAUD dalam menghasilkan anak-anak yang mandiri dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya tidaklah lepas dari keefektivitasan pemimpinnya.

Di kecamatan Mranggen terdapat 42 lembaga PAUD yang dimana masing-masing lembaga tersebut dipimpin oleh perempuan. Jika mengacu kepada beberapa penelitian tentang kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan di beberapa negara, seperti yang dikatakan oleh Sudrajat. Maka kepemimpinan perempuan di lembaga-lembaga PAUD se-kecamatan Mranggen memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti dalam penelitian ini. Apakah kondisi kepemimpinan perempuan di beberapa negara tersebut diatas memiliki kesamaan dengan kondisi kepemimpinan perempuan di PAUD se-kecamatan Mranggen.

Menurut pengamatan penulis, dalam Kepemimpinannya, para pemimpin perempuan di lembaga-lembaga PAUD se-kecamatan Mranggen menerapkan gaya kepemimpinan yang variatif; ada beberapa pemimpin yang otoriter dalam kepemimpinannya sehingga para bawahan merasa sangat tidak nyaman, ada juga yang demokratis sehingga para bawahan merasa menjadi bagian dari lembaga tersebut, bahkan ada juga yang masa bodoh dengan lembaga yang dipimpinnya. Dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa pemimpin yang kepemimpinannya efektif, namun ada juga pemimpin yang tidak efektif.

Efektivitas kepemimpinan perempuan dalam institusi pendidikan sangatlah penting bagi institusi pendidikan itu sendiri, karena dengan kepemimpinan yang efektif suatu institusi pendidikan

akan mengalami kemajuan dan pengembangan yang baik. Untuk mencapai keefektifitasan dalam kepemimpinan, haruslah didukung dengan variabel-variabel pendukung, baik yang ada dalam diri seorang pemimpin maupun dari luar atau sekitar diri seorang pemimpin. Oleh karena itu sangatlah penting untuk melihat keterkaitan, hubungan antara variabel-variabel pendukung khususnya variabel gaya kepemimpinan demokratis dan variabel dukungan sosial dengan efektivitas kepemimpinan. Juga diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi tolok ukur untuk mencapai keefektifitasan dalam kepemimpinan perempuan di lembaga PAUD se-kecamatan Mranggen.

Setelah menguraikan beberapa hal di atas mengenai isu-isu kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan dan efektivitas kepemimpinan, maka penulis bermaksud meneliti apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan demokratis dan dukungan sosial dengan efektivitas kepemimpinan perempuan? Adapun judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah "Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Dukungan Sosial dengan Efektivitas Kepemimpinan perempuan".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan demokratis dan dukungan sosial dengan efektivitas kepemimpinan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara gaya kepemimpinan demokratis dan dukungan sosial dengan efektivitas kepemimpinan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi perkembangan Psikologi Sosial, khususnya Psikologi Gender dan Psikologi Kepemimpinan.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi para pemimpin perempuan di lembaga-lembaga PAUD, khususnya di kecamatan Mranggen, agar kepemimpinannya dapat lebih efektif dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan menciptakan dukungan yang baik dari rekan kerja dan bawahannya.